



**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYERAPAN  
ANGGARAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
BOGOR TAHUN 2014-2018**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Putri Yansih

022116034

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PAKUAN**

**BOGOR**

**2022**



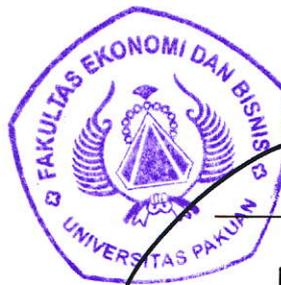
**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYERAPAN  
ANGGARAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
BOGOR TAHUN 2014-2018**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA.,  
CA, CSEP., QIA)

ANALISIS **EFISIENSI** DAN **EFEKTIVITAS** **PENYERAPAN**  
**ANGGARAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN**  
**BOGOR TAHUN 2014-2018**

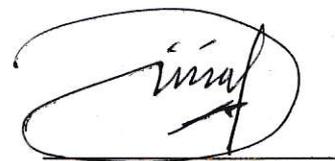
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2021

Putri Yansih  
022116034

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang  
(Ketut Sunarta , Ak., MM., CA., PIA)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFA., CA., QIA)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Dessy Herlisnawati, S.E., M.Si)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Yansih  
NPM : 02216034  
Judul Skripsi : Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja  
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun,

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, April 2022



Putri Yansih

022116034

**©Hak cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021**

**Hak cipta untuk dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mnegutip sebgaian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atu memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas EKonomi dan Bisnis UniversitasPakuan*

## **ABSTRAK**

PUTRI YANSIH. 022116034. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018. Pembimbing: Erandhi Sudarmanto dan Dessy Herlisnawati. 2022.

Pentingnya anggaran publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018.

Penelitian ini dilakukan pada lingkup instansi pemerintah Kabupaten Bogor dengan jenis penelitian deskriptif yang sumber data penelitiannya dari hasil wawancara dan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dimana sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dari tahun 2014-2018 dinyatakan efisien dan efektif. Dimana tingkat efisiensi anggaran belanja rata-rata 34.43 persen dimana kriteria tersebut dinyatakan sangat efisien dan tingkat efektivitas anggaran belanja rata-rata 96.06 persen dengan kriteria sangat efektif.

**Kata Kunci:** Efisiensi, Efektivitas dan Penyerapan Anggaran Belanja

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur seraya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018". Dalam proses penyusunan proposal penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun Alhamdulillah tidak melunturkan semangat penulis dalam menyusun proposal penelitian ini. Dalam pembuatan proposal ini mulai dari perancangan, pencarian bahan, sampai penulisan, penulis mendapat bantuan, saran, petunjuk dari banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung,

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembahasan materi maupun teknik penulisan. Namun demikian, penulis telah berusaha memberikan yang terbaik dengan semaksimal mungkin. Tanpa bimbingan dan semangat dari berbagai pihak, proposal penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Saripudin dan Ibu Ningsih yang selalu memberikan dukungan, baik secara materi maupun doa dan dukungan sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Bapak Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA., Ibu Dra. Hj. Sri Hartini, MM dan Bapak Dr. Chaidir, SE., MM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CSSA., CA., CSEP., QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Ibu Retno Matanti Endah L. SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CfrA., CA., QIA selaku Dosen Ketua Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Dessy Herlisnawati, SE., M.Si selaku Dosen Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Maman telah bersedia menjadi narasumber dalam pemberian informasi mengenai penelitian saya.
9. Ibu Euis yang sudah membantu memberikan data untuk penelitian saya.
10. Dosen-dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat bagi saya.
11. Seluruh staff Tata Usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.

12. Seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
13. Seluruh pegawai Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik (KesBangPol) Kabupaten Bogor yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Saudara-saudaraku tersayang yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan dukungan secara materil maupun non materil.
15. Teman-teman kelas A dan B angkatan 2016 selama empat tahun lebih kita selalu bersama, kelas yang penuh dengan konflik tetapi selalu ceria, selalu semangat dan tidak pernah berhenti berjuang.
16. Sahabat-sahabat tersayang Trinova, Somantri yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
17. Sahabat-sahabat tersayang SUN ( Dhea Novi W, Muhammad Adriansyah, Haqi Malik S, Restu Tri Y, Tri Resti R, Ulpa Zulianti dan Yohanes C.P Belo) yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis disaat masa-masa yang sulit.
18. Untuk Pipin Suhandi yang selalu peduli dan menemani.
19. Teman-teman bimbingan dan seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi S1 Program Studi Akuntansi Tahun 2016 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis sehingga dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya, namun kekurangan tersebut semoga dapat menjadi suatu proses pembelajaran bagi penulis. Dengan demikian, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, April 2022

Peneliti

Putri Yansih

## DAFTAR ISI

### JUDUL

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... i**

<b>LEMBAR PENGHEHASAHAN &amp; PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN ...</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR HAK CIPTA.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.1. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1. Maksud Penelitian .....	7
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.4.1. Kegunaan Praktis.....	7
1.4.2. Kegunaan Akademis.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Akuntansi Sektor Publik .....	9
2.1.1. Definisi Akuntansi Sektor Publik .....	9
2.1.1.1. Tujuan Akuntansi Sektor Publik .....	9
2.1.1.2. Sifat dan Karakteristik Sektor Publik.....	10
2.1.1.3. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik .....	11
2.1.2. Anggaran Sektor Publik.....	11
2.1.2.1. Pengertian Anggaran .....	11
2.1.2.2. Kegunaan atau Fungsi Anggaran Sektor Publik .....	12
2.1.2.3. Karakteristik Anggaran .....	14
2.1.2.4. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik .....	15
2.1.2.5. Waktu Anggaran .....	16
2.1.2.6. Pendekatan dan Penyusunan Anggaran .....	16
2.1.3. Penyerapan Anggaran .....	17
2.1.4. Belanja Daerah.....	18
2.1.4.1. Konsep Belanja Pemerintah .....	18
2.1.5. Efisiensi .....	18
2.1.5.1. Pengertian Efisiensi .....	18
2.1.5.2. Pengukuran Efisiensi .....	19
2.1.6. Efektivitas .....	20
2.1.6.1. Pengertian Efektivitas.....	20
2.1.6.2. Pengukuran Efektivitas.....	20
2.2. Peneliti Sebelumnya.....	20

2.3. Kerangka Pemikiran.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	26
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	26
3.3.1. Jenis Data Penelitian .....	26
3.3.2. Sumber Data Penelitian.....	26
3.4. Operasionalisasi Variabel .....	26
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	27
3.6. Metode Pengolahan Data .....	27
3.6.1. Rasio Efisiensi .....	27
3.6.2. Rasio Efektivitas .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor .....	29
4.1.2. Kegiatan Usaha .....	30
4.1.3. Visi dan Misi.....	30
4.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	31
4.1.4.1. Struktur Organisasi .....	31
4.1.4.2. Uraian Tugas .....	32
4.2. Kondisi atau Pelaksanaan Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018	34
4.2.1. Kondisi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan .....	34
4.3. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 .....	35
4.3.1. Rasio Efisiensi .....	35
4.3.2. Rasio Efektivitas .....	36
4.4. Pembahasan.....	38
4.4.1 Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor .....	38
4.4.2. Tingkat Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor .....	40
4.4.3. Penyerapan Anggaran Belanja .....	42
4.4.4. Faktor Penyebab Sarana dan Prasarana Pendidikan Rusak .....	44
4.4.5. Upaya Dalam Mengatasi Kerusakan Sarana dan Prasarana Pendidikan	44
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>46</b>
5.1. Kesimpulan.....	46
5.2. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah Dan

	Pembiayaan Tahun Anggaran 2014-2018 .....	5
Tabel 2.1	Kriteria Efisiensi .....	19
Tabel 2.2	Kriteria Efektivitas .....	21
Table 2.3	Peneliti Sebelumnya .....	21
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	27
Tabel 3.2	Kreteria Tingkat Efisiensi .....	28
Tabel 3.3	Kreteria Tingkat Efektivitas .....	28
Table 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014-2018 .....	34
Table 4.2	Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 .....	36
Table 4.3	Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogr Tahun 2014-2018.....	37
Table 4.4	Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten BogorTahun 2014-2018 .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor .....	6
Gambar 2.1	Konstelasi Penelitian .....	24
Gambar 4.1	Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupate Bogor .....	31
Gambar 4.2	Grafik Kenaikan/Penuruna Tingkat Eektivitas Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogr Tahun 2104-2018 .....	39
Gambar 4.3	Grafik Kenaikan/Penuruna Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogr Tahun 2104-2018 .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I. Latar Belakang**

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Menurut Renyowijoyo (2010) bagi pemerintah anggaran adalah sangat penting, sebagai otoritas pelaksanaan, sebagai alat pengawasan, alat kontrol dan pengendalian pemerintah dan pertanggungjawaban. APBN dan APBD memerlukan persetujuan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, yang setelah disetujui kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Sementara untuk organisasi bisnis adalah sangat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan dan ekonomi yang terjadi.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Secara singkat dan dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Pentingnya anggaran publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang mereka buat.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang.

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam melaksanakan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang telah dilakukan suatu pemerintah (Anfujatin, 2016). Rasio pada realisasi terhadap anggaran membuktikan telah terserapnya anggaran dalam berbagai program yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang dibahas pada penelitian ini adalah keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan yang sudah ditetapkan didalam APBD.

Efisiensi sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antar *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Menurut Mahmudi (2013) menjelaskan bahwa efisiensi adalah terkait hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan output tertentu yang dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu (Ratmono dan Solihin, 2015). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. LRA di sajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Tujuan adanya LRA menurut PP No.71 Tahun 2010) antara lain: 1) menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, 2) memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang

telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendidikan dan tugas pembantuan, hal itu tertuang dalam peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan. Adapun fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana peraturan bupati tersebut yaitu perumusan kebijakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah dibidang pendidikan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah dibidang pendidikan, pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam PerBup di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor di pimpin oleh seorang kepala dinas dengan dibantu oleh lima pejabat eselon 3, yaitu satu orang sekretaris, di bantu oleh tiga orang kepala sub bagian dan empat orang kepala bidang, masing-masing kepala bidang dibantu oleh tiga orang kepala seksi.

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Rusita Untari, yang berjudul Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung periode 2011-2014 di SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang. Lokasi penelitian di SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dokumenter dari perangkat kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang, yaitu bagian perencanaan dan evaluasi. Metode analisis deskriptif. Hasil penelitian dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari tahun 2011-2014 sudah efisien dalam penggunaan dana (anggaran) yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat bermanfaat semakin baik (*spending well*), pencapaian Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam tingkat efektifitas pada tahun 2011-2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut. Saran bagi peneliti selanjutnya, agar menjadi acuan dan peneliti mneyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti anggaran belanja langsung setiap tahun dan meneliti tentang proses jalannya program kegiatan dan program kerja anggaran belanja yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismanuel Pangkey dan Sheryl Pinatik (2015), yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini untuk menegetahui efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, sumber data yang digunakan yaitu data Kualitatif dan Kuantitatif. Hasil penelitian, dalam periode anggaran belanja 2010-2014 untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung keseluruhannya

tidak efektif karena dari setiap program dan anggaran yang direncanakan banyak program yang terealisasi tapi tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan dan ada juga program yang tidak terealisasi. Sementara untuk tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung dari periode 2010-2014 tidak efisien, karena keseluruhan anggaran belanja tidak langsung tidak dapat mencapai atau bahkan melampaui anggaran yang direncanakan. Dapat diketahui bahwa anggaran belanja sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi sehingga setiap tahun hasilnya akan berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nofitasari, dkk. yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda Periode 2011-2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda tahun 2011-2015. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kuantitatif dengan menggunakan metode kuantitatif komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Data penelitian ini merupakan hasil pengamatan dilapangan, melalui wawancara dan penyajian data secara ilmiah yaitu berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda. Teori yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja adalah analisis dan perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011-2015 bervariasi. Dimana pada tahun 2014 masuk dalam kriteria cukup efektif dan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 masuk kriteria kurang efektif, dikarenakan realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Sehingga ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tapi tidak direalisasikan secara efektif. Dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah Kota Samarinda tahun 2011-2015 secara keseluruhan efisien. Dalam melaksanakan anggaran tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dikategorikan efisien.

Terlihat dari berbagai kondisi pendidikan yang terjadi di beberapa daerah pelosok negeri ini, permasalahan pendidikan menjadi hal utama pembangunan. Tidak lepas kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibu kota harusnya pendidikan sudah bukan lagi menjadi masalah utama dalam pembangunan, tapi justru pendidikan adalah hal yang belum mampu diwujudkan oleh pemerintah sebagaimana visi kabupaten untuk menjadi kabupaten termaju di Indonesia.

Bahkan beberapa masalah pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bogor sangatlah memprihatinkan, jika ditinjau dari letak geografisnya Kabupaten Bogor sangatlah dekat dengan ibu kota negara yang seharusnya permasalahan tersebut mampu teratasi. Beberapa masalah pendidikan di Kabupaten Bogor adalah rendahnya angka jumlah mengenyam pendidikan yang hanya mencapai delapan tahun, ini berarti pendidikan sangatlah rendah yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Masih rendahnya minat sekolah masyarakat yang disebabkan karena akses pendidikan yang

dirasakan oleh masyarakat dan infrastruktur sekolah yang masih jauh dari kebutuhan pendidikan, ini terlihat masih adanya sekolah yang kekurangan kelas.

Selain itu, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bogorindonews.com yang dipublikasikan pada tanggal 23 Oktober 2019 kadisdik melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor ditemukan amruknya pfallon SMPN 1 Ciampea yang menimpa siswa dan adanya ratusan siswa MI Mathlahul Anwar kampung Ciangsana, Desa Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, belajar beratapkan langit. Sedangkan informasi berdasarkan Bogor Today pada tanggal 28 Desember 2019, jumlah sekolah rusak di Kabupaten Bogor mencapai 10.027 gedung. Dengan rincian bangunan SD sebanyak 8.620 gedung dan SMP sebanyak 1.407. Data tersebut dikatakan oleh Dewan Pendidikan (Wandik) Kabupaten Bogor. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, Abidin Said mengatakan bahwa kondisi tersebut berbanding terbalik dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bogor yang ingin memajukan daerah.

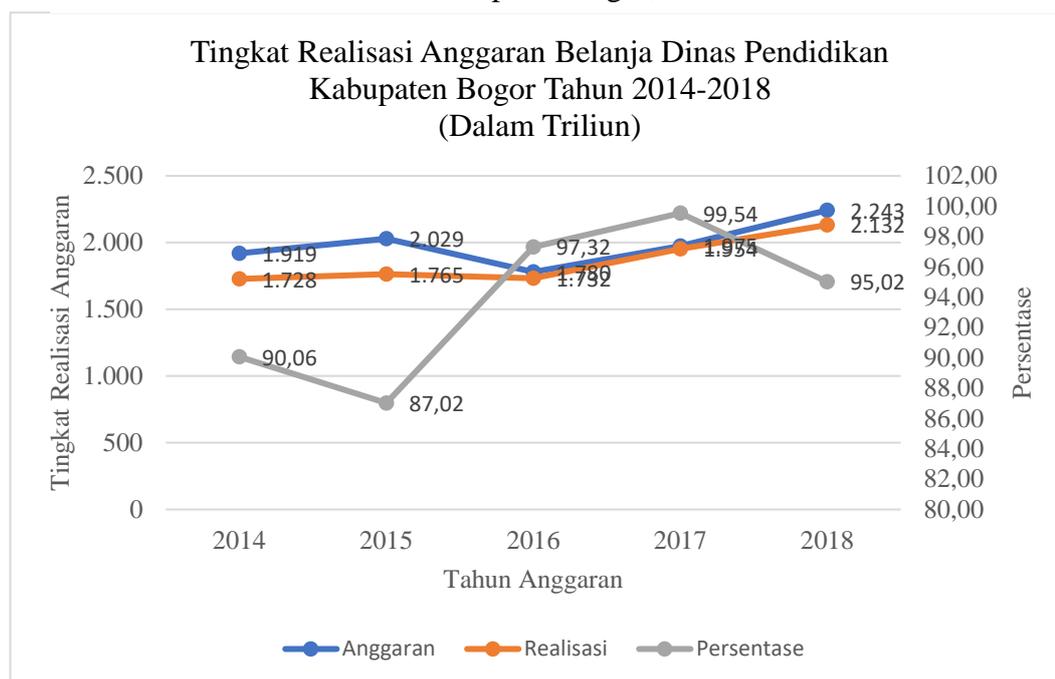
Seperti yang kita ketahui sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor pendukung proses belajar mengajar yang penting di setiap satuan pendidikan, dalam arti bahwa bangunan dan ruangan-ruangan di setiap satuan pendidikan yang harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, aksesibilitas dan kenyamanan. Namun dalam realitasnya, Kabupaten Bogor termasuk kategori kabupaten yang memiliki daftar sekolah rusak yang cukup tinggi di Indonesia.

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,  
Pendapatan, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
2014	1,919,778,768,000	1,728,923,847,346	190,854,920,654	90.06
2015	2,029,120,898,000	1,765,876,369,576	263,244,528,424	87.02
2016	1,780,484,051,000	1,732,586,088,908	47,627,962,092	97.32
2017	1,975,875,372,000	1,954,375,477,736	83,369,000,000	99.54
2018	2,243,797,289,000	2,132,154,615,207	111,642,673,793	95.02

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, 2019



Gambar 1.1

### Grafik Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Berdasarkan penjelasan tabel dan grafik anggaran dan realisasi belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor lima tahun berturut-turut yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang realisasinya mengalami kenaikan dan penurunan di tahun-tahun tertentu. Pada tahun 2014 realisasi belanja rendah dibandingkan dengan anggaran belanja yaitu 90.06% selanjutnya ditahun 2015 realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 87.02%, pada tahun 2016 realisasi belanja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 97.32% kemudian pada tahun 2017 realisasi belanja mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 99.54% dan di tahun 2018 realisasi belanja menurun lagi yaitu hanya 95.02% ini disebabkan karena adanya program yang tidak dilaksanakan

Realisasi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dilihat dari tingkat persentase realisasinya secara keseluruhan terealisasi secara optimal, hanya ditahun 2015 realisasinya sangat menurun yaitu 87.02%. Berdasarkan informasi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

### 1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan dalam latar belakang dan naik turunnya penyerapan anggaran belanja dinas pendidikan. Khususnya pada tahun 2015

tingkat realisasi anggarannya menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Efisiensi merupakan tolak ukur penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Sedangkan efektivitas merupakan tolak ukur pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya atau efektivitas bisa diartikan melakukan tugas yang benar..

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Untuk menganalisis Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Tahun 2014-2018.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti  
Diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang merealisasikan anggaran dengan efisien dan efektif.
- b. Bagi Pembaca  
Diharapkan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta dijadikan bahan kepustakaan yang akan memberikan kontribusi pemikiran yang positif.

#### **1.4.2. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya mengenai analisis efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.1.1. Definisi Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Sedangkan Menurut Halim (2014), Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Renyowijoyo (2010), Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sedangkan menurut Wiratna (2015) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Dari beberapa pendapat diatas bisa dikatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan serangkaian proses untuk mengumpulkan, mencatat, klasifikasi, melakukan analisis, sampai dengan membuat laporan transaksi untuk organisasi publik.

##### **2.1.1.1. Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018), yang dikutip dari *American Accounting Association (1970* dalam Glynn menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang di perlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomisme atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan dan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi publik.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, menentukan biaya suatu program proyek, atau aktivitas serta kelayakan baik secara ekonomis maupun teknis. Selain itu, informasi akuntansi dapat di gunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi.

Menurut Renyowijoyo (2010) yang dikutip dari *American Accounting Association* (1970) dalam Glyn (1993) menyatakan bahwa tujuan organisasi sektor publik untuk:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. (tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*manajemen control*)).
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenang dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik ( tujuan ini terkait dengan akuntabilitas *Accountability*).

### **2.1.1.2 Sifat dan Karakteristik Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhi.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulence*. Komponen lingkungan yang memengaruhi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.

- a. Faktor Ekonomi
  - Pertumbuhan Ekonomi
  - Tingkat inflasi
  - Pendapatan per kapita (GNP)
  - Struktur produksi
  - Tenaga kerja
  - Arus modal
  - Cadangan devisa
  - Teknologi, dsb
- b. Faktor Publik
  - Hubungan masyarakat-negara
  - Legimitasi pemerintah
  - Ideologi negara
  - Kelembagaan, dsb
- c. Faktor Kultural
  - Agama, suku, ras, budaya, bahasa
  - Historis

- Sosiologi masyarakat
  - Pendidikan
- d. Demografi
- Pertumbuhan penduduk
  - Usia penduduk
  - Migrasi
  - Tingkat kesehatan

### **2.1.1.3. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Bastian (2010) lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik.

### **2.1.2 Anggaran Sektor Publik**

#### **2.1.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Menurut PP Nomor 21 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Sedangkan Menurut Khusaina (2019) penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu.

Mardiasmo (2018) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Secara singkat dan dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Menurut Julita dan Jufiren (2012) mengatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah di sahkan. Anggaran (*budget*) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan

unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang. Sedangkan menurut Deddi dan Ayuningtyas (2010) mengatakan anggaran sektor publik adalah rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Oleh karena itu organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Sesuai definisi-definisi diatas disimpulkan bahwa anggaran sektor publik mempunyai strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik, yaitu penyediaan pelayanan publik..

### **2.1.2.2 Kegunaan/Fungsi Anggaran Secara Umum**

Menurut Nasution (2019), anggaran secara umum memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan arah atas kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan sehingga kegiatan yang dilakukan akan menjadi terarah kepada tujuan yang akan dikehendaki.
2. Akan menjadi alat koordinasi antar bagian yang melaksanakan kegiatan.
3. Anggaran akan dapat mengharmoniskan atau mensinkronkan antar bagian yang ada dalam di dalam organisasi.
4. Anggaran akan dapat membatasi kegiatan atau aktivitas hanya pada yang penting dan perlu. Hal-hal yang kurang dipandang penting akan dapat dihindarkan atau ditangguhkan sebab setiap aktivitas pasti memerlukan dana (uang) sedangkan anggaran telah membatasi besaran dana (uang) untuk setiap aktivitas yang diperlukan.
5. Anggaran dapat dijadikan alat pengawasan organisasi.  
Dengan adanya anggaran maka setiap penyimpangan yang ada akan lebih mudah diukur sehingga berbagai tindakan perbaikan dapat diambil.
6. Penggunaan metode, alat, tenaga kerja akan semakin efektif dan efisien sehingga kinerja organisasi akan semakin baik dan terarah sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.
7. Memaksa semua pihak yang ada di dalam organisasi, baik dari pimpinan puncak sampai kepada tenaga pelaksana untuk sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh anggaran.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Selain itu anggaran sektor publik juga merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan kegiatan masyarakat.

Menurut khaisan (2019) anggaran sektor publik mempunyai beberap fungsi utama, yang dikutip dari Mardiasmo (2002), yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
  - b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.
  - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
  - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Anggaran sebagai alat Pengendalian (*Control Tool*)
 

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.
  3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*).
 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijaksanaan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
  4. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Politic Tool*)
 

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan *political tool* sebagai bentuk komitmen sebagai eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill, coalition building*, keahlian berorganisasi dan pemahaman dari prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar bahwa sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.
  5. Anggaran Sebagai Alat koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*).

Setiap unit kerja pemerintahan terlihat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsisten suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder I* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi. Namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

### 2.1.2.3 Karakteristik Anggaran

Anggaran harus disusun secara benar dan sistematis penyusunan anggaran yang telah mengikuti prosedur yang benar tidak menjamin anggaran itu pasti berhasil. Anggaran juga memiliki karakteristik-karakteristik tertentu. Menurut Dedi Ismatullah (2010) karakteristik anggaran secara umum adalah sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa para manajer setuju untuk bertanggungjawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.

Menurut Dedi Ismatullah (2010) selain karakteristik secara umum diatas terdapat juga karakteristik anggaran yang baik, yaitu:

1. Anggaran disusun berdasarkan program.
2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian.

Menurut Mulyadi (2010) karakteristik anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa para manajer setuju untuk bertanggungjawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik anggaran merupakan alat perencanaan pertanggungjawaban yang disusun berdasarkan program yang dinyatakan dalam satuan keuangan atau moneter yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **2.1.2.4 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

##### a. Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin(*recurrent expenditure*) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.

Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan,

##### b. Anggaran Modal/Investasi(*capital/investment budget*)

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, perabotan dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintahan dan selanjutnya akan menambah anggaran turun untuk biaya operasional dan pemeliharannya.

Adapun jenis-jenis anggaran sektor publik menurut Deddi dan Ayuningtyas (2010) yaitu:

1. Anggaran Operasional dan Anggaran Modal
2. Anggaran berdasarkan pengesahan
3. Anggaran dana umum dan anggaran dan khusus
4. Anggaran tetap dan anggaran fleksibel
5. Anggaran eksekutif dan anggaran legislatif

### 2.1.2.5. Waktu Anggaran

Menurut Nasution (2019) dalam hal waktu dan periode, pelaksanaan waktu anggaran terdiri atas:

1. Sistem tahun anggaran keuangan (*financial budget tahun system*). Dalam sistem ini, anggaran hanya berlaku untuk waktu satu tahun dan di Indonesia berlaku dari 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun, sekarang berlaku tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. Sistem tahun anggaran yang ditetapkan (*limited budget tahun system*). Dalam sistem ini, anggaran berlaku selama satu tahun akan tetapi masih dapat diperpanjang 6 bulan lagi.

### 2.1.2.6. Pendekatan dan Penyusunan Anggaran

Setiap anggaran, baik yang sederhana maupun yang rumit pasti melibatkan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari masing-masing unsur tersebut umumnya jarang yang memberikan penekanan yang sama. Sungguh berbeda akan tetapi seringkali perbedaan yang ada masih bersifat relatif dan tidak bersifat mutlak serta mencolok. Nasution (2019) menjelaskan pendekatan yang dikenal di dalam penyusunan anggaran umumnya adalah:

1. Pendekatan Objek-Pengeluaran (*The Object of Expenditure Approach*). Pendekatan obyek pengeluaran ini disebut sebagai pendekatan tradisional atau pendekatan lini-time. Pendekatan ini merupakan pendekatan paling mudah dan sederhana dari pendekatan lainnya yang dikenal. Pendekatan ini berorientasi kepada pengendalian pengeluaran (*control of expenditure*) yang sangat populer bagi legislatif di dalam mengendalikan eksekutif. Secara sederhana pendekatan ini melibatkan:
  - a. Departemen (Lembaga) bawahan eksekutif dan Lembaga Pemerintahan serta Lembaga Negara lainnya mengajukan budget kepada top eksekutif (presiden) berbagai tipe pengeluaran yang diperlukan.
  - b. Presiden menghimpun, memodifikasi dan mengajukan semua permintaan atau kebutuhan Departemen (Lembaga) bawahan eksekutif dan Lembaga pemerintahan serta Lembaga Negara lainnya kepada legislative (dewan) berdasarkan obyek pengeluarannya.
  - c. Lembaga legislatif membuat pos-pos pengeluaran setelah melakukan berbagai peninjauan atas pengajuan anggaran dari eksekutif (Presiden). Data program dan kinerja dilampirkan di dalam dokumen anggaran meskipun data tersebut hanya dipakai sebagai pelengkap atau pendukung permintaan menurut obyek pengeluaran.
2. Pendekatan Kinerja (*Performance Approach*). Pendekatan ini merupakan perbaikan dari pendekatan tradisional atau pendekatan obyek pengeluaran yang oleh para ahli dinilai banyak mengandung kelemahan utama karena hanya

memusatkan kepada obyek pengeluaran yang kemudian dituangkan dalam bentuk angka tanpa melihat urgensinya. Fokus utama pendekatan ini ialah evaluasi efisiensi terhadap aktivitas yang ada dengan menggunakan alat utama akuntansi biaya dan pengukuran kerja.

Di dalam sistem ini orientasi tidak semata-mata kepada obyek pengeluaran tetapi sudah mengarah kepada berbagai rencana kegiatan, proyek apa yang hendak dikerjakan, apa saja yang harus dilakukan, serta berapa jumlah dana yang diperlukan dan bagaimana pula cara mengalokasikan dana agar dana yang ditetapkan dapat dipakai secara efisien dan efektif. Metode ini dapat diringkas menjadi:

- a. Pengklasifikasian rekening anggaran menurut fungsi dan aktivitas dan juga menurut unit organisasi dan obyek pengeluaran.
- b. Mengamati dan juga mengukur aktivitas yang ada untuk memperoleh efisiensi optimal setra menetapkan biaya standar biaya.
- c. Mendasarkan budget periode yang akan datang menurut standar biaya perunit dikaitkan dengan banyaknya unit yang diharapkan dari aktivitas yang diestimasikan. Total anggaran setiap unit Departemen atau Lembaga Pemerintah/Negara untuk setiap aktivitas atau kinerja yang sama akan dijumlahkan sehingga nantinya akan diperoleh angka standar yang kemudian akan digunakan untuk penyusunan anggaran di masa yang akan datang. Kontribusi yang paling penting dari pendekatan ini adalah sebagai berikut:
  - Pendekatan ini jauh lebih menekankan kepada anggaran aktivitas yang diusulkan.
  - Organisasi anggaran menurut aktivitas perlu didukung oleh estimasi biaya dan syarat kuantitas pencapaian.
  - Pendekatan ini lebih menekankan kepada ukuran *output* (hasil) dan *input* (masukan).

### **2.1.3. Penyerapan Anggaran**

Menurut Halim (2014: 84), bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu. Senada dengan pendapat Halim, menurut Kuncoro (2013) bahwa penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

#### **2.1.4. Belanja Daerah**

Menurut peraturan pemerintah No.58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran.

Menurut PP Nomor 21 Tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

##### **2.1.4.1. Konsep Belanja Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi lain Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pemandagri No.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menterei Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

##### a. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal

##### b. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- Belanja pegawai
- Belanja bunga
- Belanja subsidi

- c. Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

#### **2.1.5. Efisiensi**

##### **2.1.5.1. Pengertian Efisiensi**

Pemandagri 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 1 tentang Azas Umum Pengelolaan Daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Khusus untuk efisiensi dijelaskan lebih lanjut bahwa efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Menurut Mahmudi (2013) menjelaskan bahwa efisiensi adalah terkait hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan output tertentu yang dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

Menurut Dedi dan Ayuningtyas (2010) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma.

#### 2.1.5.2. Pengukuran Efisiensi

Mahsun (2012) menjelaskan bahwa pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat output dengan tingkat input dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi disini diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja yang merupakan *output* dengan total anggaran belanja sebagai *input*.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1  
Kriteria Tingkat Efisiensi

Persentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampau 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Efisiensi merupakan salah satu bagian indikator kinerja *value for money* yang dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi persingkatan input.
3. Menurunkan input pada tingkat output yang sama.
4. Menurunkan input dalam proporsi penurunan output.

Menurut mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa dalam pengukuran kinerja, efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Efisiensi Alokasi  
Efisiensi aloksi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya, input pada tingkat kapasitas optimal.
2. Efisiensi teknis atau manajerial  
Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

### **2.1.6. Efektivitas**

#### **2.1.6.1 Pengertian Efektivitas**

Menurut Ravianto (2014) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Bungkaes (2013) efektivitas adalah merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang di maksud mengenai “Efektivitas”. Bagaimana pun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila diteelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya; (2). Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna ( mencapai hasil yang optimal).

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Mahmudi (2015) menjelaskan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Dari penegertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

#### **2.1.6.2. Pengukuran Efektivitas**

Menurut Paratai (2017) rasio efektifivits menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja:

$$Efektivitas = \frac{RealisasiAnggaranBelanja}{AnggaranBelanja} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.2  
Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektif
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327, 2016

## 2.2. Peneliti Sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Peneliti Sebelumnya

No	Nama penulis	Judul	Variabel	Hasil	Publikasi
1	Widyana (2016)	Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Efektifitas dan Efisiensi	Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja dinyatakan Efektif dan Efisien	Universitas Muhammadiyah Palembang
2.	Ulfah (2018)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas Dan Efisiensi kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan	Efektivitas dan Efisiensi	Realisa-si Anggaran tidak efektif dan cukup Efisien	Universitas Medan Area
3.	Untari	Analisis Efisiensi dan efektivitas Pelaksanaans Realisasi Anggaran	Efisiensi dan Efektifitas	Dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari tahun 2011 – 2014 sudah efisien dalam	Universitas Dian

		Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang		penggunaan dana (Anggaran) yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat bermanfaat semakin baik ( <i>spending well</i> ) begitupun Pencapaian Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam tingkat efektifitas pada tahun 2011 – 2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut.	Nuswantoro
4.	Dwi Andana (2019)	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kediri	Efisiensi	Anggaran Belanja Langsung dinyatakan efisien	Universitas Nusantara PGRI Kediri
5.	Fahrianta dan Carolina (2012)	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Efisiensi	Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kapuas dinyatakan efisien	STIE Indonesia Banjarmasin
6.	Julita (2012)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Efektivitas dan Efisiensi	Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 dan 2012 kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai sangat efektif. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran pendapatan, pada tahun 2009-2012 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai efisien. Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran belanja, pada tahun 2009-2012 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja.	

7.	Basariyah (2017)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMBD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Efektivitas dan Efisiensi	Tingkat dan kriteria Efektivitas untuk Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara Efektif, begitupun Rasio Efisiensi yang dihasilkan selama lima tahun menunjukkan hasil yang bervariasi, rata-rata pengelolaan anggaran belanja menunjukkan kategori cukup efisien, bahkan tahun 2011 dan 2015 hasilnya efisien, ini menunjukkan bahwa BPMPD Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana strategis.	<i>ISSN: 2302-2019</i>
8.	Pangkey dan Pinatik (2015)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara	Efektivitas dan Efisiensi	Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas pada tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efektif dan tingkat efisiensi dari tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi sebaiknya meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran belanja, dibutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun perencanaan anggaran.	EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan merupakan tulang punggung seluruh tubuh penelitian. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

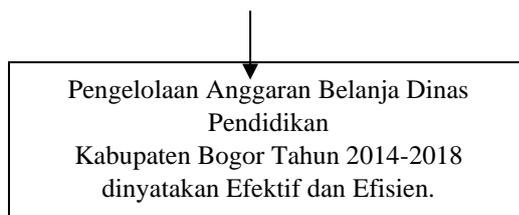
Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri 13 Tahun 2006 dalam pasal 4 ayat 1 tentang azas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada pertaturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Khusus untuk efisiensi dan efektivitas dijelaskan lebih lanjut. Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu dan efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil

Studi kasus dalam lingkungan pendidikan yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengenai masih kurang fasilitas dan infrastruktur untuk sekolah yang ada di Kabupaten Bogor salah satu diantaranya yaitu SDN Terbuka 1 Cijeruk, sarana prasarana dalam pendidikan sangat penting karena merupakan faktor pendukung proses belajar mengajar yang penting di setiap satuan pendidikan, dalam arti bahwa bangunan dan ruangan-ruangan di setiap satuan pendidikan yang harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, aksesibilitas dan kenyamanan dan beberapa program lainnya yang masih belum tercapai secara optimal.

Selain fenomena diatas berdasarkan anggaran yang telah penulis dapatkan, bahwa dalam laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa tingkat penyerapannya fluktuatif atau selalu berubah-ubah, persentase pencapaian atau realisasi anggaran yang paling rendah terdapat di tahun 2015 yaitu sebesar 87.02%.

Berdasarkan uraian diatas, secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:





Gambar 2.2 Konstelasi Penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif (Eksploratif) dengan metode penelitian studi kasus mengenai analisis efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran belanja dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018.

### **3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema penelitian (judul). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah efisiensi dan efektivitas anggaran belanja. Unit analisis yang digunakan adalah Dinas Pendidikan yaitu yang terdapat pada lokasi penelitian Jl.Nyaman No.1, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **3.3.1. Jenis data penelitian**

- a. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, FGD, wawancara atau berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti
- b. Data kuantitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Jenis kualitatif yang didapatkan melalui hasil wawancara sedangkan jenis data kuantitatif berupa tingkatan anggaran belanja tahun 2014-2018 yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

#### **3.3.2 Sumber data penelitian**

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari unit analisis yang diteliti yaitu individu/orang dalam perusahaan/instansi/organisasi, kelompok individu atau dari perusahaan/instansi/organisasi yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data seperti: media masa, perusahaan penyedia data, bursa efek, data yang digunakan peneliti sebelumnya, data yang disediakan pada *statistic software*, dsb.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

### **3.4. Operasionalisasi Variabel**

Operasional Variabel merupakan penjabaran masing-masing variabel ke dalam indikator, ukuran dan skala data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Efisiensi	Rasio Efisiensi	$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$	Rasio
Efektivitas	Rasio Efektivitas	$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$	Rasio

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai dasar dalam penelitian dalam makalah seminar ini adalah penelitian survai. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu:

- a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait di instansi, guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan makalah seminar ini.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah serta memperoleh informasi melalui publikasi dan laporan yang ada kaitannya dengan penelitian.

### 3.6. Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bersifat kuantitatif (*non statistic*) mengenai analisis perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan landasan teori di bab kajian pustaka maka analisis perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja dapat di analisis dengan analisis data berikut:

#### 3.6.1. Rasio Efisiensi

Menurut Dedi dan Ayuningtyas (2010) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan.

Mahsun (2006:183) menjelaskan bahwa pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat output dengan tingkat input dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja:

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2  
Kriteria Tingkat Efisiensi

Persentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
> 60%	Sangat Efisien

### 3.6.2. Rasio Efektivitas

Mahmudi (2015) menjelaskan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Mahsun (2006:182) menjelaskan bahwa pengukuran efektivitas mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.3  
Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Dinas Pendidikan kabupaten Bogor berdiri pada tahun 1975 dengan nama Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan Luar Biasa atau disebut dengan Kabin PDLB yang beralokasi di jalan Gedong Sawah No 11 Bogor dan di Kepalai oleh Bapak Onat Kartadimadja. Selanjutnya Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar (Kabi PDLB) berganti nama sesuai dengan struktur Organisasi baru yaitu menjadi kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Bogor, terdiri dari:

1. Kabin PDPLB
2. Kabin Olahraga
3. Kabin Kebudayaan
4. Kabin Pendidikan Masyarakat

Nama kepala dinas yang pernah menjabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

No	Nama Kepala Dinas	Periode
1.	Drs. E. Djakarsih	1975-1980
2.	Drs. Yusuf Pandi	1980-1985
3.	M. Sholeh	1985-1987
4.	Drs. Barnas Resmanara, MA	-
5.	H. Ali Djakarsih Bashar	-
6.	Ir. Drs. H. Didi suwardi	-
7.	H. Deden Nururidin	2004-2005
8.	Drs. Endang Basuni. SH., MM	2005-2007
9.	Drs. Adang Suptandar	2007-2008
10.	HM. Lukman, MM., M.Si	2008-2010
11.	H. Didi Kurnia, SH., M.Si	2010-2013
12.	Drs. H. Rustandi. M.Si.,	2013-2014
13.	Dace Supriadi, SH. M.Si	2014-2016
14.	H. TB. A Luthfie Syam	2016-2019
15.	Entis Sutisna, S.Pd., MM	2019

Pada tahun 2008 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Bogor berubah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.11 Tahun 2008, pada pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1.2 Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati yang mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi di bidang Pendidikan.

Adapun kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berdasarkan perda tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang Pendidikan;
- b. Penyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;
- c. Pembinaan bidang Pendidikan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4.1.3 Visi Dan Misi**

##### **1. Visi**

“Terselenggarakannya Layanan Pendidikan yang Prima Untuk Membentuk Manusia Yang Berkualitas Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Termaju Di Indonesia”. Dengan penetapan rumus visi tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan layanan pendidikan dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing yang mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengolah dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam sekitarnya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah yaitu kabupaten termaju di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan terselenggaranya layanan Pendidikan yang prima antara lain adalah:

- a. Terselenggaranya layanan pendidikan yang tersedia secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Bogor.
- b. Terselenggaranya layanan Pendidikan yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bogor.
- c. Terselenggaranya layanan Pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat, baik dunia usaha maupun dunia industry.

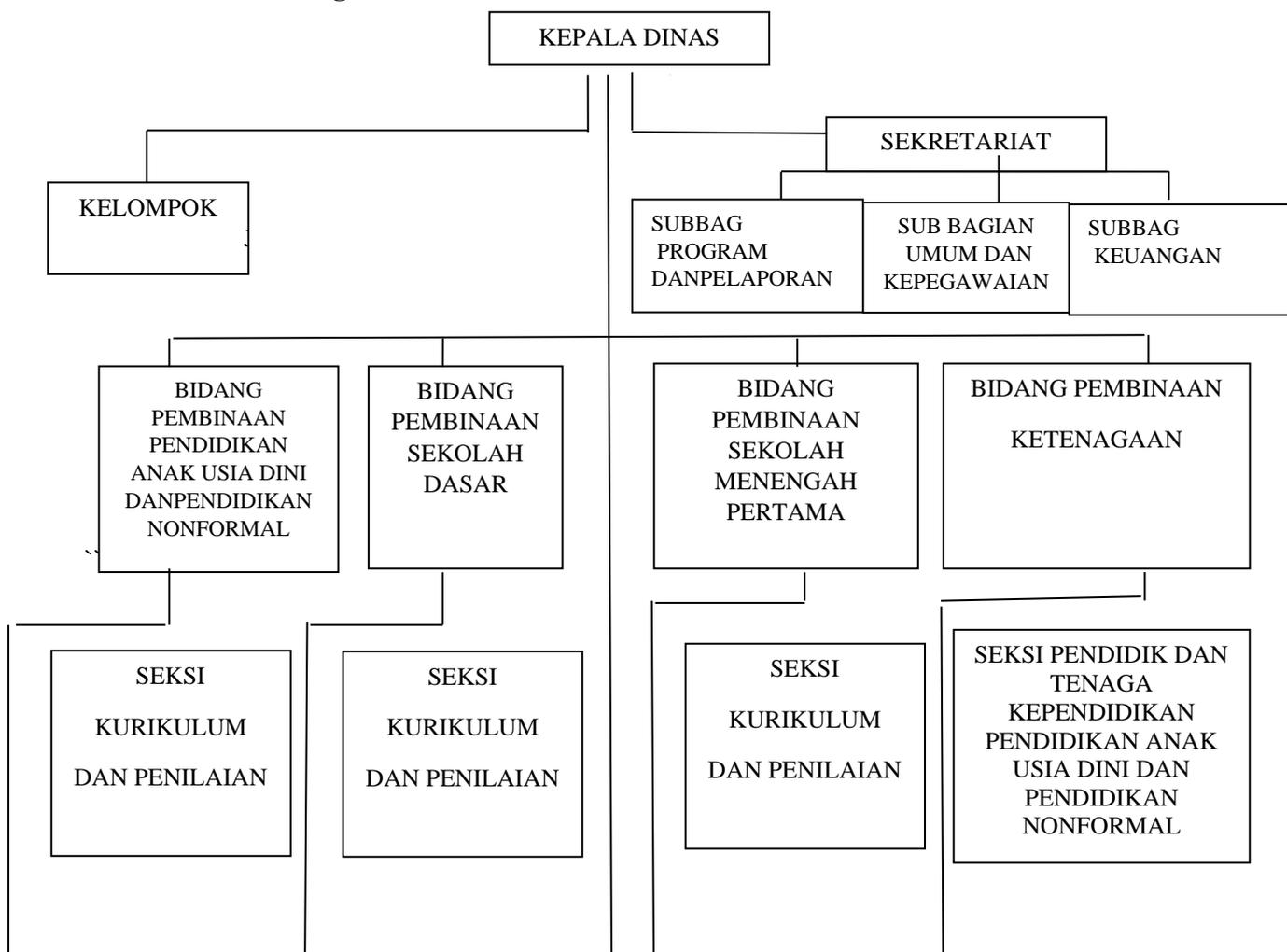
- d. Terselenggarakannya layanan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan keterbelakangan sosial-ekonomi, geografi dan gender.
- e. Terselenggaranya pendidikan yang menjamin kepastian bagi seluruh warga di Kabupaten Bogor untuk dapat memperoleh layanan pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha maupun dunia industry.

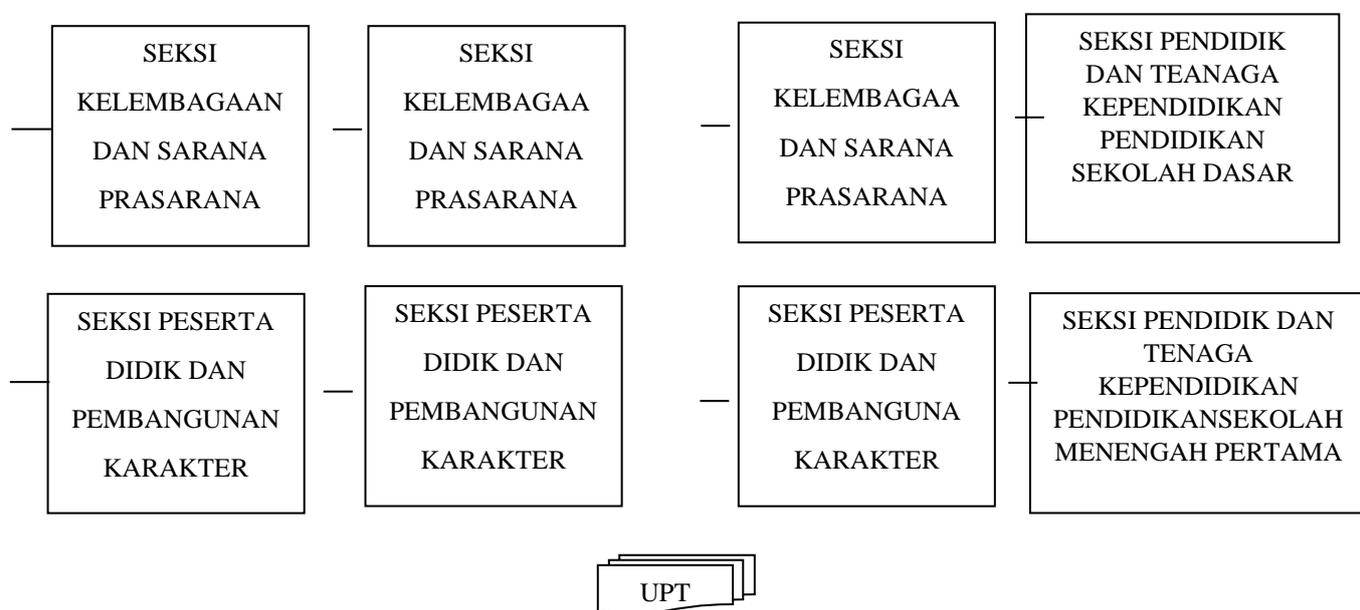
2. Misi

- a. Menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau, artinya bahwa pelayanan pendidikan dapat diarahkan pada upaya yang dapat menjamin ketersediaan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor bagi semua kelompok masyarakat usia sekolah yang dapat dijangkau baik secara ekonomis maupun geografis.
- b. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, artinya bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tanggungjawab dalam meningkatkan profesionalitas, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan pendidikan yang mampu menyelenggarakan manajemen serta tata kelola pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

**4.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

**4.1.4.1 Struktur Organisasi**





Gambar 4.1 Struktur Orgasnisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

#### 4.1.4.2 Uraian Tugas

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaetn Bogor mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
  - a. Kepala dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan tugas pembantuan.
  - b. Fungsi Kepala Dinas
    1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
    2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;
    3. Pembinaan, pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas
  - a. Tugas pokok sekretaris dinas: Sekretrais mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan dinas;
  - b. Fungsi

1. Pengelolaan administrasi program dan pelaporan;
  2. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  3. Pengelolaan administrasi keuangan.
3. Bidang Pendidikan Dasar
    - a. Tugas pokok Bidang Pendidikan Dasar mempunyai membantu kepala dinas dalam melaksanakan Pendidikan dasar.
    - b. Fungsi
      1. Pengelolaan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
      2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan;
      3. Pengelolaan pembinaan tenaga pendidik TK/SD/SMP.
  4. Bidang Pendidikan Menengah
    - a. Tugas Pokok  
Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan Pendidikan menengah.
    - b. Fungsi
      1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
      2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
      3. Pengelolaan pembinaan tenaga pendidika SMA/SMK.
  5. Bidang Pendidikan Nonformal
    - a. Tugas Pokok  
Bidang Pendidikan nonformal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Pendidikan nonformal.
    - b. Fungsi
      1. Pengelolaan kegiatan Pendidikan masyarakat;
      2. Pengelolaan kegiatan Pendidikan kesetaraan; dan
      3. Pengelolaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  6. Bidang Sarana Prasarana
    - a. Tugas Pokok  
Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan.
    - b. Fungsi
      1. Pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan TK/SD;
      2. Pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan SMP;
      3. Pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan SMA/SMK dan Pendidikan nonformal.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugasnya

dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) subag, 12 (dua belas) seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, membawahi:
  - a. Sub bagian Program dan Pelaporan;
  - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
  - c. Sub bagian Keuangan.
3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
  - a. Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
  - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
  - c. Seksi Bina Tenaga Pendidik TK/SD/SMP.
4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
  - a. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
  - c. Seksi Bina Tenaga Pendidik SMA/SMK.
5. Bidang Pendidikan nonformal, membawahi:
  - a. Seksi pendidikan masyarakat;
  - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan; dan
  - c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana SMP; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana SMA/SMK.
7. UPT
8. Kelompok Jabatan Fungsional

## **4.2 Kondisi atau Pelaksanaan Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018**

### **4.2.1. Kondisi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan**

Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan selama lima tahun berturut-turut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
2014	1,919,778,768,000	1,728,923,847,346	190,854,920,654	90.06
2015	2,029,120,898,000	1,765,876,369,576	263,244,528,424	87.02
2016	1,780,484,051,000	1,732,586,088,908	47,627,962,092	97.32
2017	1,975,875,372,000	1,954,375,477,736	83,369,000,000	99.54
2018	2,243,797,289,000	2,132,154,615,207	111,642,673,793	95.02

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 dikatakan fluktuatif dimana dalam lima tahun berturut-turut mengalami kenaikan dan penurunan walaupun begitu dana yang dikeluarkan hampir semua terealisasi dengan baik namun jika kita lihat di lapangan masih banyak sarana dan prasarana Pendidikan dilapangan yang belum terfasilitasi.

### 4.3 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018

#### 4.3.1 Rasio Efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja dikali 100% .

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran belanja yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor setiap tahunnya sebagai berikut:

a. Tahun 2014

$$Efisiensi\ Anggaran\ Belanja = \frac{493.499.377.169}{1.728.923.847.346} \times 100\% \\ = 28.54\%$$

b. Tahun 2015

$$Efisiensi\ Anggaran\ Belanja = \frac{523.012.891.864}{1.765.876.369.576} \times 100\% \\ = 29.62\%$$

c. Tahun 2016

$$Efisiensi\ Anggaran\ Belanja = \frac{395.898.903.841}{1.732.856.088.908} \times 100\% \\ = 22.85\%$$

d. Tahun 2017

$$Efisiensi\ Anggaran\ Belanja = \frac{823.088.809.558}{1.954.375.477.736} \times 100\% \\ = 42.11\%$$

e. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Anggaran Belanja} &= \frac{932.2444.231.066}{2.132.154.615.207} \times 100\% \\ &= 43.72\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.2**  
**Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018**

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio %	Kriteria
2014	Rp.493.499.377.169	1,728,923,847,346	28.54	Sangat Efisien
2015	Rp.523.012.891.864	1,765,876,369,576	29.62	Sangat Efisien
2016	Rp.395.898.903.841	1,732,586,088,908	22.85	Sangat Efisien
2017	Rp.823.088.809.558	1,954,375,477,736	42.11	Sangat Efisien
2018	Rp.932.244.231.066	2,132,154,615,207	43.72	Sangat Efisien
Rata-rata			33.34	Sangat Efisien

Sumber data: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 tingkat efisiensi sebesar 28.54% menjadi 29.62% pada tahun 2015 dalam sudut pandang perubahan efisiensi ini dapat dilihat sebagai peningkatan efisiensi yaitu menjadi sangat efisien. Pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat efisiensi sebesar 6.77% menjadi 22.85% dan masih dalam kriteria sangat efisien. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan tingkat efisiensi kembali sebesar 19.26% menjadi 42.11%, tingkat efisiensi ini dalam kriteria dinyatakan sangat efisien. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan tingkat efisiensi sebesar 1.61% yaitu menjadi 43.72% tetapi masih dalam kriteria sangat efisien.

#### 4.3.2 Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan anggaran belanja yang di targetkan. Kinerja pemerintah dikategorikan efektif dengan melihat rasio tingkat efektivitas yang telah di tentukan. Jika rasio kurang dari 60% maka kinerja pemerintah di katakan tidak efektif, rasio antara 60% sampai dengan 80% kinerja pemerintah dikatakan kurang efektif, rasio antara 80% sampai dengan 90% rasio dinilai cukup efektif, rasio antara 90% sampai dengan 100% rasio dinilai efektif dan apabila rasio lebih dari 100% maka rasio dinilai sangat efektif. Semakin besar rasio efektif maka semakin bagus kinerja pemerintah.

Pengukuran tingkat efektivitas dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja dikali 100%.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tingkat efektivitas anggaran belanja langsung yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor setiap tahunnya sebagai berikut:

a. Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Anggaran Belanja} &= \frac{1.728.923.847.346}{1.919.778.768.000} \times 100\% \\ &= 90.06\% \end{aligned}$$

b. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Anggaran Belanja} &= \frac{1.765.876.369.576}{2.029.120.898.000} \times 100\% \\ &= 87.02\% \end{aligned}$$

c. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Anggaran Belanja} &= \frac{1.732.856.088.908}{1.780.484.051.000} \times 100\% \\ &= 97.32\% \end{aligned}$$

d. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Anggaran Belanja} &= \frac{1.954.375.477.736}{1.975.875.372.000} \times 100\% \\ &= 98.91\% \end{aligned}$$

e. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Anggarn Belanja} &= \frac{2.132.154.615.207}{2.243.797.289.000} \times 100\% \\ &= 95.02\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor**  
**Tahun 2014-2018**

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Anggaran Belanja	Rasio (%)	Kriteria
2014	Rp.1.728.923.847.346	Rp.1.919.778.768.000	90.06	Efektif
2015	Rp.1.765.876.369.576	Rp.2.029.120.898.000	87.02	Cukup Eektif
2016	Rp.1.732.856.088.908	Rp.1.780.484.051.000	97.32	Efektif
2017	Rp.1.954.375.477.736	Rp.1.975.875.372.000	98.91	Efektif
2018	Rp.2.132.154.615.207	Rp.2.243.797.289.000	95.02	Efektif
Rata-rata			93..06	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada tahun 2014 sebesar 90.06% yang termasuk dalam kriteria efektif sedangkan pada tahun 2015 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 3.04% yaitu menjadi 87.02% yang masuk dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2016 dan 2017 tingkat efektifitas anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengalami peningkatan kembali sebesar 10.03% dan 1.59% yaitu menjadi 97.32% dan 98.91% yang dikategorikan efektif sedangkan pada tahun 2018 tingkat efektifitas mengalami penurunan sebesar 3.89% sehingga menjadi 95.02% yang dikategorikan efektif. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat efektifitas anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dapat dikatakan efektif, tingkat efektifitas tertinggi ada pada tahun 2017 dan tingkat efektivitas yang terendah ada pada tahun 2015.

Pengertian efektifitas berhubungan dengan tingkat keberhasilan operasi suatu sektor publik, sehingga sesuatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memberi pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan dalam bidang Pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Manfaat analisis efektivitas anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur tentang apa saja yang sudah disediakan oleh dinas Pendidikan tersebut seperti halnya bangunan sekolah yang didirikan sudah memenuhi standar sehingga bagi anak-anak yang belajar merasakan kenyamanan, kurikulum yang sesuai sehingga mendapatkan pengetahuan yang sesuai, angka putus sekolah berkurang sehingga akan membantu mewujudkan visi misi yang sudah di rencanakan.

Berdasarkan perhitungan rasio diatas, secara keseluruhan anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dikatakan sangat efisien, dengan tingkat efisiensi kurang dari 60%, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masuk dalam kategori sangat efisien. Dengan tingkat persentase yang sangat efisiensi menghasilkan tingkat persentase yang efektif.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1. Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor**

Dari hasil perhitungan efisiensi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Pada tahun 2014 tingkat efisiensi sebesar 28.54% menjadi 29.62% pada tahun 2015 dalam sudut pandang perubahan efisiensi ini dapat dilihat sebagai peningkatan efisiensi yaitu menjadi sangat efisien. Pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat efisiensi sebesar 6.77% menjadi 22.85% dan masih dalam kriteria sangat efisien. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan tingkat efisiensi kembali sebesar 19.26% menjadi 42.11%, tingkat efisiensi ini dalam kriteria dinyatakan sangat efisien. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan tingkat efisiensi sebesar 1.61% yaitu menjadi 43.72% tetapi masih dalam kriteria sangat efisien.

Gambar 4.2

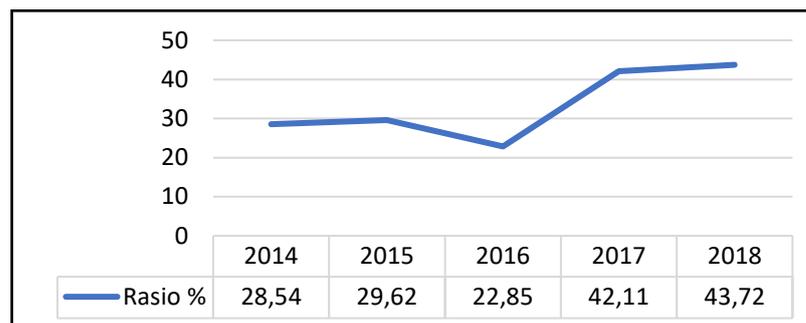


Diagram Kenaikan/Penurunan Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018

Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor lima tahun berturut-turut mengalami perubahan. Namun, jika kita lihat tingkat rasio efisiensi pengelolaan anggaran belanja di katakan sangat efisien dengan rata-rata rasio 33.34 persen. Berikut merupakan hasil wawancara mengenai efisiensi pengelolaan anggaran belanja Dinas Pendidikan yang telah penulis lakukan:

### **EFISIENSI ANGGARAN**

#### **Berdaya guna**

1. Apakah setiap divisi mengeluarkan anggaran di waktu yang tepat?

**Jawab:** Ya, karean sudah ada anggaran kas, mereka sudah membuat anggaran kas untuk kegiatan A di bulan apa, seperti itu.

2. Apakah setiap divisi mengeluarkan anggaran yang terlalu besar?

**Jawab:** Tidak, harus sesuai tidak boleh terlalu besar, kalau emang di anggarkan 100 ya harus 100 maksimal, paling juga ada efisiensi, kadang kan ada penawaran harga pasti gk terlalu besar

3. Bagaimanakah cara mencapai target sesuai dengan rencana?

**Jawab:** Itu, kepada teknis kalau saya si bikin anggaran kas, agar tujuan tercapai

#### **Ekonomis**

4. Apakah anggaran yang dikeluarkan sudah efisien?

**Jawab:** kalau saya perhatikan alhamdulillah, karena di pemda itu banyak aturan juga gak bisa kita belanja misalkan fotocopy nih tidak bisa selera kita ada SAP nya, insyaallah sudah efisien, udah ada aturannya bel apapun maksimal harga sudah ada.

#### **Pelaksanaan Anggaran Dapat Dipertanggungjawabkan**

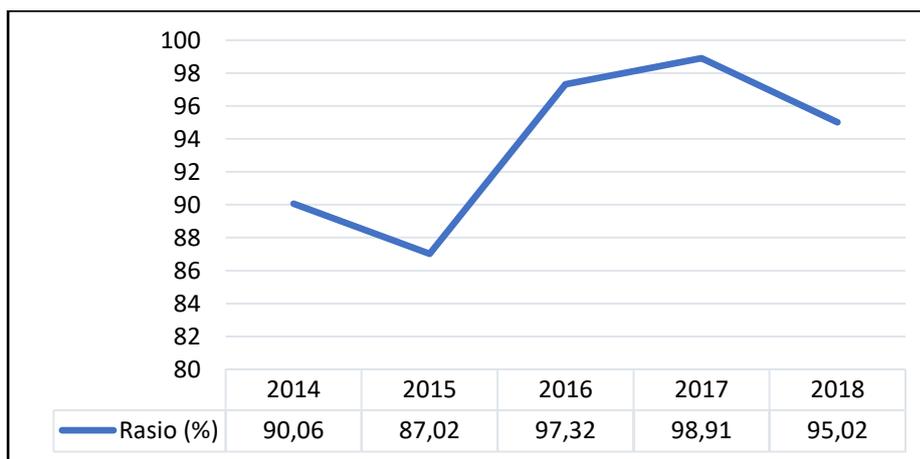
5. Apakah laporan keuangan di susun sesuai dengan peraturan yang berlaku?

**Jawab:** Ya, sudah.

Sejalan degan wawancara di atas, diketahui bahwa Dinas Pendidikan telah megelola anggaran dengan sangat efisien, yaitu dengan adanya penghematan biaya dari anggaran yang telah ditetapkan.

#### 4.4.2. Tingkat Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada tahun 2014 sebesar 90.06% yang termasuk dalam kriteria efektif sedangkan pada tahun 2015 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 3.04% yaitu menjadi 87.02% yang masuk dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2016 dan 2017 tingkat efektifitas anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengalami peningkatan kembali sebesar 10.03% dan 1.59% yaitu menjadi 97.32% dan 98.91% yang dikategorikan efektif sedangkan pada tahun 2018 tingkat efektifitas mengalami penurunan sebesar 3.89% sehingga menjadi 95.02% yang dikategorikan efektif. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat efektifitas anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dapat dikatakan efektif, tingkat efektifitas tertinggi ada pada tahun 2017 dan tingkat efektivitas yang terendah ada pada tahun 2015.



Sumber: Di olah Oleh Peneliti

Gambar 4.3

Grafik tingkat efektifias Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014-218

Tingkat efektivitas angaran belanja berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Namun walaupun berfluktuasi realisasi anggaran belanja digunakan dengan efektif. Adapun untuk tahun 2015 anggaran belanja dikatakan cukup efektif karena adanya program-program yang belum terealisasikan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Berikut merupakan hasil wawancara mengenai efektivitas pengelolaan anggaran belanja Dinas Pendidikan yang telah penulis lakukan:

#### EFEKTIVITAS ANGGARAN

### Realisasi Anggaran

1. Apakah setiap divisi sudah diberikan petunjuk tentang teknik perhitungan perkiraan pendapatan dan pengeluaran?

**Jawab:** Sudah, pasti itu, karena kalau tidak mengerti bagaimana mereka bisa menganggarkan. Jadi begini, munculnya kegiatan itu ada tahap-tahapannya, mulai dari musrenbang desa, kecamatan itu nanti ke kabupaten, itu kan ada kegiatan, sebenarnya banyak usulan-usulan, makanya itu salah satu tadi mengapa realisasi bagus tapi masih ada, karena anggaran terbatas, usulan dari merak mungkin 100 tapi hanya bisa di akomodir separuhnya

2. Apakah anggaran yang dikeluarkan sudah sesuai dengan rencana anggaran? arus dan sudah.dikeluarkan sesuai dengan rencana

### Kesesuaian Dengan Peraturan

1. Apakah setiap divisi memiliki batasan dalam proses penyusunan anggaran?

**Jawab:** ya, masing-masing bidang di batasi,ada pagu. Contoh bidang A memiliki pagu 1M dia nyusun tidak boleh melebihi pagu itu, harus sesuai tidak, boleh melebihi pagu yang sudah di tentukan.

2. Apakah setiap ddivisi memiliki batasan waktu dalam penyampaian informasi anggaran?

**Jawab:** ya, karena kerja kita kan ada dateline, kalau tidak ada dateline kapan jadinya , dateliine itu prosesnya panjang ,udah ditentukan nanti dari BAPPEDA, musrenbang tingkat desa dari tanggal sekian-sekian udah ada. Kemarin aja hampir dua bulan, ada relatif, yang menentukan tanggal itu BAPPEDA.

### Berhasil Guna

1. Apakah setiap anggaran yang dikeluarkan selalu memenuhi kebutuhan Pendidikan?

**Jawab:** Harus, karena sudah ada pagunya dari kantor, kita tidak boleh lepas dari kalua kita penddidikan ya harus Pendidikan , gak ada dinas Pendidikan berhubungan dengan keolahragaan atau misalnya ke Kesehatan, harus bersentuhan dengan Pendidikan.

2. Apakah program yang sudah direncanakan terealisasi dengan baik?

**Jawab:** Ya, alhamdulillah terealisasi dengan baik.

3. Bagaimana dampak yang dirasakan dari program yang sudah terealisasi?Apakah sudah maksimal?

**Jawab:** Innyaallah, maksimal, tinggal kendalanya yaitu anggaran terbatas. Sedangkan banyak sekali di daerah itu banyak sekali sekolah-sekolah yang rusak yang tidak teranggarkan, untuk yang sydah teranggarkan alhamdulillah, Kembali lagi ke pagu, karena kita

sudah memiliki pagu, tidak boleh melebihi walaupun kebutuhan itu banyak.

### **Mengatasi Hambatan Dan Penyimpangan**

4. Apakah SDMsudah mengerti dalam menyusun anggaran yang baik dan benar?

**Jawaban:** Sudah karena kita bintek juga jadi sudah mengerti.

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa anggaran telah direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana anggaran dan peraturan sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan selalu memenuhi kebutuhan pendidikan.

#### **4.4.3. Penyerapan Anggaran Pendidikan**

Seluruh kebijakan Pendidikan yang telah diambil tidak terlepas dari reformasi kerangka hukum bidang Pendidikan yang diawali dengan amandemen UUD RI 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Melalui amandemen ini, bangsa Indonesia menetapkan bahwa Pendidikan tidak lagi hanya sekedar hak warga negara sebagaimana tertulis dalam UUD RI 1945 sebelum amandemen, melainkan lebih dari itu, juga merupakan hak azasi manusia. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib pula membiayainya. Dalam sejarah perjalanan UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen, hanya bidang Pendidikan yang ditetapkan alokasi anggarannya sebesar 20 persen dari anggaran APBD. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah bertekad untuk memajukan dunia Pendidikan, terutama Pendidikan dasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa pembangunan di sektor Pendidikan sudah dianggarkan di APBN, termasuk pembangunan fisik seperti pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru.anggaran pembangunan ini berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan kepemerintah daerah dan instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Menurut narasumber penelitian, anggaran untuk pendidikan bersumber dari APBN, APBD dan DAK. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana APBN yang disalurkan melalui kas daerah. Dana aloksi khusus ini diperuntukan untuk kepentingan pembangunan Gedung sekolah dan ruang kelas baru. Sedangkan dana APBD yang merupakan dana kas daerah atau dana pendamping yang telah dipersiapkan sebesar 10 persen dari jumlah kas daerah tersebut..

Pengelolaan anggaran merupakan kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah dan penyusunan. Dalam pengelolaan anggaran terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan beberapa diantaranya yaitu efektif dan efisien. Diamana efektif merupakan anggaran harus digunakan sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat, serta anggarannya direalisasikan sesuai dengan rencana pembangunan dan habis dipakai, sedangkan efisien, setiap pengeluaran anggaran didasarkan pada proporsi kebutuhan program dan kegiatan

daerah guna menghasilkan output ataupun *income* tanpa mengurangi pelayanan yang maksimal pada masyarakat

Berdasarkan prinsip pengelolaan anggaran di atas menurut perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil perhitungan Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Efisiensi Anggaran belanja	28.54%	29.62%	22.85%	42.11%	43.72%
Kriteria	Sangat Efisien				
Rasio Efektivitas Anggaran Belanja	90.06%	87.02%	97.32%	98.91%	95.02%
Kriteria	Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Berdasarkan tabel di atas pengelolaan anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten selama lima tahun berturut-turut mengalami perubahan, pada tahun 2015 dapat dilihat tingkat efektivitas sebesar 87.02 persen yang masuk dalam kriteria cukup efektif, hal tersebut terjadi karena masih banyak program yang belum terealisasi, seperti program pembangunan ruang kelas baru, rehabilitas kelas/bangunan sekolah, pengadaan lahan, dan lain-lain. Namun, jika dihitung dalam rata-rata seperti hasil perhitungan dalam poin sebelumnya pengelolaan anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dapat dikatakan efektif dengan tingkat rasio 90.06 persen. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa anggaran telah direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana anggaran dan peraturan sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan selalu memenuhi kebutuhan pendidikan.

Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor lima tahun berturut-turut mengalami perubahan. Namun, jika kita lihat tingkat rasio efisiensinya pengelolaan anggaran belanja di katakan sangat efisien dengan rata-rata rasio 33.34 persen. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Dinas Pendidikan telah melaksanakan program sesuai tujuan yang hendak dicapai, walaupun dengan adanya penghematan biaya yang telah dilakukan.

#### **4.4.4 Faktor Penyebab Sarana dan Prasarana Rusak di Kabupaten Bogor**

Seperti yang kita ketahui bahwa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana pendidikan khususnya bangunan sekolah dapat dari

berbagai faktor. Yang dapat menyebabkan kerusakan pada sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bogor berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber yaitu kaSuBag program dan laporan adalah sebagai berikut:

1. Kurang aktifnya lembaga sekolah dalam pengajuan perbaikan, dalam memfasilitasi sekolah yang memerlukan dana setiap *stakeholder* harus berperan aktif guna untuk menghindari miskomunikasi, agar sekolah tersebut terdata untuk di fasilitasi dengan baik oleh Dinas Pendidikan. Jika salah satu bagian dari *stakeholder* tidak berperan aktif maka sekolah tersebut tidak teranggarkan untuk difasilitasi oleh Dinas Pendidikan
2. Tidak sesuainya standar pengajuan dari sekolah, jika pengajuan yang diajukan tidak sesuai standar maka pihak dinas juga belum bisa menganggarkan sekolah tersebut, karena data yang sudah masuk akan ditinjau kembali agar anggaran yang digunakan tepat sasaran.
3. Kurang matang dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut dapat mengakibatkan sekolah cepat rusak dalam waktu 1 tahun, maka dari itu perencanaan pembangunan harus di lakukan dengan sematang mungkin agar bangunan dapat bertahan lama dan melakukan pengawasan yang ketat, agar bahan maupun pada saat pembangunan sekolah tidak dilakukan dengan asal.
4. Usia bangunan, hal tersebut tidak dapat dihindari dapat mempengaruhi rusaknya bangunan sekolah secara bersamaan, karena kebanyakan sekolah di bangun pada tahun 1970-an maka tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah tersebut akan rusak dimakan usia.
5. Anggaran yang belum cukup, dikarenakan program yang disusun tidak hanya berfokus ke perbaikan sekolah yang rusak ataupun memfasilitasi sekolah, maka mengakibatkan anggaran yang digunakan belum cukup untuk memperbaiki permasalahan yang ada.

Berdasarkan faktor di atas dapat diketahui bahwa penyebab rusaknya sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya dari pemerintah saja, namun penyebabnya dapat dari faktor lembaga sekolah, bencana alam dan faktor alam.

#### **4.4.5 Upaya Dalam Mengatasi Kerusakan Sarana Dan Prasana Pendidikan**

Berdasarkan pembahasan faktor yang memengaruhi sarana prasarana sekolah rusak agar menciptakan sekolah aman dan nyaman maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu meningkatkan alokasi anggaran APBD Perubahan 2017 untuk menuntaskan perbaikan sekolah terutama mengenai rehab ruang kelas yang rusak.
2. Anggaran pembangunan sekolah untuk kelas jauh segera diprioritaskan dalam APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018.
3. Penyusunan *blue-print Roadmap* untuk perbaikan pembangunan sekolah-sekolah rusak.

4. Perbaiki sistem pendataan sekolah rusak dengan menyusun Pedoman Baku sebagai kriteria prioritas perbaikan kelas rusak. Kelima, membuka partisipasi publik yang luas dalam pengawasan pengerjaan proyek infrastruktur sekolah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa upaya mewujudkan sekolah aman dan nyaman ini penting untuk menghadirkan lingkungan sekolah yang ramah terhadap anak. Pada dasarnya, konsep sekolah aman dan nyaman merupakan sebuah konsep sekolah yang memiliki daya dukung infrastruktur sarana dan prasarana yang optimal sebagaimana yang diamanatkan Pemrendikbud Nomor 24 tahun 2007. Konsep aman dan nyaman diyakini memiliki korelasi terhadap pencapaian peningkatan kualitas pendidikan siswa karena berbasis dukungan kurikulum dan metode pengajaran baru.

Untuk mewujudkan sarana belajar yang aman dan nyaman memang tidak mudah karena melibatkan berbagai pihak dan memerlukan proses yang panjang. Namun upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan harus tetap diperjuangkan. Agar pemerintah dapat memaksimalkan perannya sebagai pelaksana amanat undang-undang dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu adanya dukungan dan pengawasan publik dari kelompok masyarakat terhadap sekolah rusak.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian maupun wawancara yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor lima tahun berturut-turut berfluktuasi dengan tingkat rasio rata-rata 96.06 persen yang berkriteria efektif dan setiap program dan anggaran yang direncanakan terealisasi dengan tidak melebihi anggaran yang telah di tentukan.
2. Pengelolaan anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor lima tahun berturut-turut berfluktuasi dengan tingkat rasio rata-rata 34.43 persen yang berkriteria sangat efisien dan seluruh anggaran yang digunakan tidak melampaui anggaran yang direncanakan, artinya selalu ada penghematan biaya di setiap anggaran yang sudah di rencanakan.

#### **5.2 Saran**

Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang lebih konkrit terkait dengan penyerapan anggaran melalui wawancara lebih mendalam lagi dengan data yang lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andana, Rizal Ragil Dwi (2019). *Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Dinas Perpustakaan Kabupaten Kediri*. Disertasi. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Carolina, Viani. dan Fahrianta, Riswan Yudhi (2012). Analisis Efisien Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Volume 13 Nomor 1, halaman 64-65.
- Julita (2013). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara.
- Tantri, Sakina Safir. dan Irmawati, Putri (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol.1 No 1.
- Basariyah, Siti (2015). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, volume 5 Nomor 6, Juni 2016, halaman 27-37.
- Pangkey, Imanuel. dan Pinatik, Sherly (2015). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Volume 3 Nomor 4, Desember 2015, halaman 33-43.
- Khotimah, Ade Khusnul. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014-2017, Kebumen, halaman 2-5.
- Apriliyana, Ina (2017). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016*. Disertasi: Universitas Tidar.
- Muryanti, Kiky (2017). Analisis Reaslisasi Anggaran Untuk Menilai efektivitas Dan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015. *Publikasi Ilmiah*. Disertasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ulfa, Siti Mardhiyah (2018). *Analisis Realisasi Anggaran Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan*. Disertasi: Universitas Medan Area.
- Sartika, Dwi (2018). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatra Utara*. Disertasi: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Widiyana, Anita (2016). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang*. Disertasi: Universitas Muhammadiyah Palembang.

<https://nasional.republika.co.id/berita/px24ca18000/tak-punya-kelas-smp-terbuka-1-cijeruk-bogor-belajar-beratapkan-terpal>

<https://bogor.kompas.com/read/2019/08/29/17163871/8-tahun-siswa-sebuah-smp-di-bogor-belajar-di-tenda-beratapkan-terpal-sobek?page=all>

[nurafiyahmaiznati.com](http://nurafiyahmaiznati.com)

Ramdhiani, Rifka, Angelina Setiawan, Mia. *Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatra Barat.* Disertasi: Universitas Negeri Padang.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Yansih  
Alamat : Kp. Pasirmuncang, 01/07, Desa Sukatani, Kecamatan  
Parakansalak, Kabupaten Sukabumi  
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 20 Desember 1996  
Umur : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan  

- SD : SDN Ciburial
- SMP : Daruttauhi Al-Islami
- SMK : Yayasan Adicita Nirmala (YAPAN)
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, April 2022  
Peneliti

Putri Yansih

## LAMPIRAN

### TEKS WAWANCARA

#### EFEKTIVITAS ANGGARAN

##### Realisasi Anggaran

1. Apakah setiap divisi sudah diberikan petunjuk tentang teknik perhitungan perkiraan pendapatan dan pengeluaran?

**Jawab:** Sudah, pasti itu, karena kalau tidak mengerti bagaimana mereka bisa menganggarkan. Jadi begini, munculnya kegiatan itu ada tahap-tahapannya, mulai dari musrenbang desa, kecamatan itu nanti ke kabupaten, itu kan ada kegiatan, sebenarnya banyak usulan-usulan, makanya itu salah satu tadi mengapa realisasi bagus tapi masih ada, karena anggaran terbatas, usulan dari merak mungkin 100 tapi hanya bisa di akomodir separuhnya

2. Apakah anggaran yang dikeluarkan sudah sesuai dengan rencana anggaran?

**Jawab:** Ya, harus dan sudah.dikeluarkan sesuai dengan rencana

##### Kesesuaian Dengan Peraturan

3. Apakah setiap divisi memiliki batasan dalam proses penyusunan anggaran?

**Jawab:** ya, masing-masing bidang di batasi,ada pagu. Contoh bidang A memiliki pagu 1M dia nyusun tidak boleh melebihi pagu itu, harus sesuai tidak, boleh melebihi pagu yang sudah di tentukan.

4. Apakah setiap ddivisi memiliki batasan waktu dalam penyampaian informasi anggaran?

**Jawab:** ya, karena kerja kita kan ada dateline, kalau tidak ada dateline kapan jadinya dateliine itu prosesnya panjang ,udah ditentukan nanti dari BAPPEDA, musrenbang tingkat desa dari tanggal sekian-sekian udah ada. Kemarin aja hampir dua bulan, ada relatif, yang menentukan tanggal itu BAPPEDA.

##### Berhasil Guna

5. Apakah setiap anggaran yang dikeluarkan selalu memenuhi kebutuhan Pendidikan?

**Jawab:** Harus, karena sudah ada pagunya dari kantor, kita tidak boleh lepas dari kalua kita penddidikan ya harus Pendidikan , gak ada dinas Pendidikan berhubungan dengan keolahragaan atau misalnya ke Kesehatan, harus bersentuhan dengan Pendidikan.

6. Apakah program yang sudah direncanakan terealisasi dengan baik?

**Jawab:** Ya, alhamdulillah terealisasi dengan baik.

7. Bagaimana dampak yang dirasakan dari program yang sudah terealisasi?Apakah sudah maksimal?

**Jawab:** Inshaallah, maksimal, tinggal kendalanya yaitu anggaran terbatas. Sedangkan banyak sekali di daerah itu banyak sekali sekolah-sekolah yang rusak yang tidak teranggarkan, untuk yang sydah teranggarkan alhamdulillah, Kembali lagi ke pagu, karena kita sudah memiliki pagu, tidak boleh melebihi walaupun kebutuhan itu banyak.

### **Mengatasi Hambatan Dan Penyimpangan**

8. Apakah SDMsudah mengerti dalam menyusun anggaran yang baik dan benar?

**Jawaban:** Sudah karena kita bintek juga jadi sudah mengerti.

### **EFISIENSI ANGGARAN**

#### **Berdaya guna**

9. Apakah setiap divisi mengeluarkan anggaran di waktu yang tepat?

Jawab: Ya, karean sudah ada anggaran kas, mereka sudah membuiat anggara kas untuk kegiatan A di bulan apa, seperti itu.

10. Apakah setiap divisi mengeluarkan anggaran yang terlalu besar?

Jawab: Tidak, harus sesuai tidak boleh terlalu besar, kalua emang di anggarkan 100 ya harus 100 maksimal, paling juga ada efisiensi, kadang kan ada penawaran harga pasti gk trlalu besar

11. Bagaimanakah cara mencapai target sesuai dengan rencana?

Jawab: Itu, kepada teknis kalau saya si bikin anggaran kas, agar tujuan tercapai

#### **Ekonomis**

12. Apakah anggaran yang dikeluarkan sudah efisien?

Jawab: kalau saya perhatikan alhamdulillah, karena di pemda itu banyak aturan juga gak bisa kita belanja misalkan fotocopy nih tidak bisa selera kita ada SAP nya, insyaallah sudah efisien, udah ada aturannya bel apapun maksimal harga sudah ada.

13. Apakah laporan keuangan di susun sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Jawab: Ya, sudah.

## DOKUMENTASI

